

PENGARUH KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA 2004-2013

THE INFLUENCE OF REGIONAL DISPARITY ON POVERTY IN INDONESIA DURING 2004-2013

Ari Mulianta Ginting

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI, Gedung Nusantara I Lt.2,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia,
e-mail: ari.ginting@dpr.go.id)

Naskah diterima: 31 Januari 2015, direvisi: 9 Februari 2015,
disetujui: 20 Februari 2015

Abstract

Indonesia's economic development is intended to increase the country's people welfare, but its disconnection to equality principle causes regional disparities, which eventually leads to mass-poverty. This research aims to reveal the development of poverty and regional disparities, and to analyze the impact of regional disparities to regional GDP, agglomeration, and investment in increasing poverty in Indonesia. Using quantitative and qualitative methods and data from 2004 to 2013, it concludes that from the year 2004 to 2013, poverty level in Indonesia has decreased, in line with the decline in regional disparities. The decrease in regional disparities is indicated by the Williamson Index, and the result of quantitative analysis with a panel regression of data probes that the regional disparities and agglomeration show a positive and significant impact on poverty reduction in the country. In addition, the regional GDP and investment have a negative and significant impact on poverty reduction. Thus, the writer argues, the government should take a crash program to further reduce the regional disparities, a policy which is needed to more reduce mass-poverty in Indonesia.

Keywords: regional disparity, poverty, Indonesia, PDRB, investment, agglomeration, 2004-2013.

Abstrak

Pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, namun mengabaikan azas pemerataan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan, yang memunculkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah dan menganalisis pengaruh variabel ketimpangan pembangunan antarwilayah, PDRB, investasi dan aglomerasi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan data dari tahun 2004 sampai dengan 2013, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: dari tahun 2004 sampai dengan 2013 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sejalan dengan semakin menurunnya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Penurunan ketimpangan ini ditunjukkan dengan Indeks Williamson yang semakin menurun untuk Indonesia bagian barat dan timur. Hasil analisa kuantitatif dengan regresi panel data menemukan bahwa variabel ketimpangan pembangunan dan aglomerasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel PDRB dan investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil itu, pemerintah harus melakukan *crash program* untuk mengatasi lebih jauh ketimpangan pembangunan, agar kemiskinan dapat menurun lebih signifikan lagi di Indonesia.

Kata Kunci: ketimpangan pembangunan, antarwilayah, kemiskinan, Indonesia, PDRB, investasi, aglomerasi, 2004-2013.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan memang menjadi salah satu masalah utama umat manusia yang sudah ada sejak dulu. Fenomena ini telah ada sejak peradaban manusia hingga kini masih menjadi masalah utama di negara manapun. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat umum, bukan merupakan fenomena sosial khusus pada masyarakat yang berlatar belakang suku bangsa dan agama. Namun kemiskinan menjadi

ukuran martabat suatu negara.¹ Hal tersebut juga berlaku di Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami problema yang sama.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa orang miskin, anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Amanat ini secara tegas dan lugas menegaskan bahwa problema kemiskinan menjadi salah satu hal yang utama yang harus menjadi program pembangunan

¹ Mohammad Mulyadi, *Kemiskinan: Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta : Publica Press, 2014, hlm. v.

negara ini. Ditambah lagi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam aline ke-4 secara tersurat menegaskan tujuan didirikannya Pemerintah Negara Indonesia. Salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari tujuan ini adalah pemerintah harus menciptakan dan mendorong kesejahteraan bagi rakyat namun harus disertai dengan adanya azas keadilan bagi semua masyarakat dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut maka dibutuhkan suatu proses yang dinamakan pembangunan dan pertumbuhan.

Dalam proses pembangunan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berlangsung secara kontinu akan tetapi tidak diimbangi dengan azas keadilan dan pemerataan. Dampaknya yang langsung terlihat adalah timbulnya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terkebelakang atau kurang maju. Untuk itu maka diperlukan suatu kebijakan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan.

Ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah menurut Sjafrizal (2012) merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah relatif terbelakang (*underdeveloped region*).²

Lebih lanjut Sjafrizal (2012) mengatakan bahwa penyebab ketimpangan ekonomi antarwilayah juga disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup banyak akan memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan

daerah lain mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan memproduksi barang dan jasa dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan daerah yang bersangkutan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat.³

Ketimpangan wilayah timbul karena tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terkebelakang atau kurang maju. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antarwilayah satu dengan lainnya. Armida. S Alisjahbana mengatakan bahwa salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Indonesia adalah kesenjangan antardaerah sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Pulau Jawa dan Bali. Berkembangnya provinsi-provinsi baru sejak tahun 2001 dan desentralisasi diduga akan mendorong kesenjangan antardaerah yang lebih lebar.⁴ Ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia yang terjadi menurut Deputi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Imron Bulkin, mengatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bapenas terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pembangunan daerah sampai saat ini masih banyak ketimpangan. Secara khusus ketimpangan tersebut hampir disemua sektor terutama pada ketersediaan sarana publik, pendidikan dan kesehatan. Bukan hanya ketimpangan saja, bahkan pembangunan selama ini mengabaikan kawasan timur Indonesia.⁵ Bahkan Presiden terpilih Joko Widodo dalam kunjungannya ke redaksi *Bisnis Indonesia* mengakui bahwa adanya ketimpangan pemerataan pembangunan di Indonesia bagian timur, beliau mengatakan bahwa ketimpangan sangat jelas sekali di lapangan di Indonesia bagian timur.⁶ Untuk itu maka pembangunan yang dilaksanakan harus didasarkan kepada azas pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dimana pun mereka berada.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antarwilayah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan

³ *Ibid* hlm. 119.

⁴ Armida S. Alisjahbana, *Kesenjangan Regional di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2005.

⁵ "Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Masih Terjadi", (*Online*), (<http://nasional.kontan.co.id/news/ketimpangan-pembangunan-di-indonesia-masih-tinggi>, diakses tanggal 9 September 2014.)

⁶ "Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Timur", (*Online*), (<http://news.bisnis.com/read/20140721/15/244928/jokowi-akui-ketimpangan-pembangunan-di-indonesia-timur>, diakses tanggal 9 September 2014 dari diunduh tanggal 9 September 2014.)

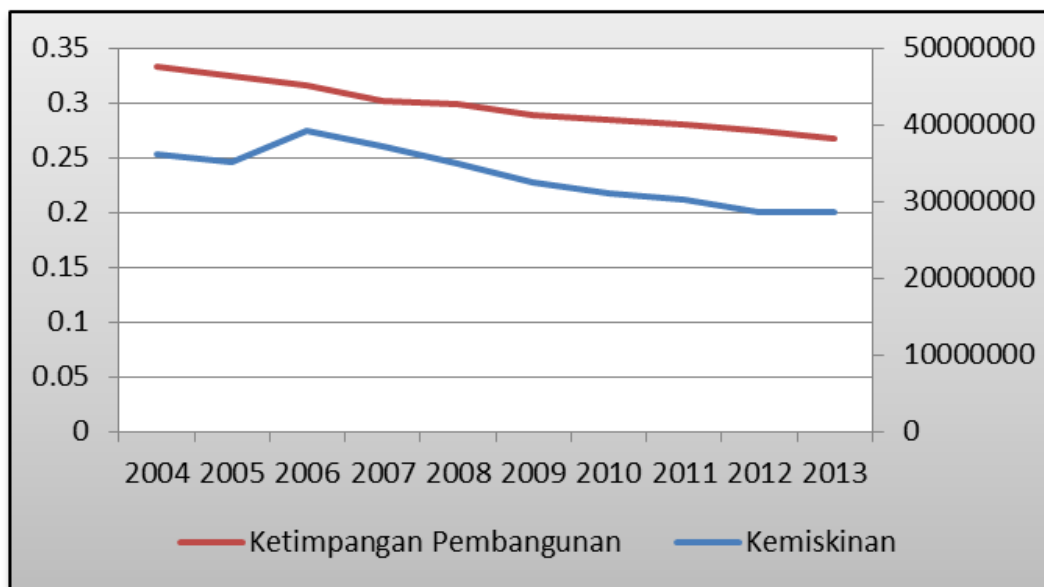
² Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm.108-110.

merupakan suatu tahapan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antarwilayah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷

Ketimpangan pembangunan antarwilayah terjadi mengakibatkan terhambatnya perkembangan wilayah diakibatkan oleh rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah menghasilkan daerah-daerah yang maju, berkembang

(PDRB) dari masing-masing provinsi, baik provinsi yang berada di Indonesia bagian Barat maupun yang berada di Indonesia bagian Timur.

Perkembangan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson pada Gambar 1. menunjukkan tren yang menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan yang semakin menurun antarwilayah di Indonesia, baik di Indonesia bagian barat maupun bagian timur. Sejalan dengan ketimpangan yang semakin menurun, tren kemiskinan di Indonesia pada periode sama juga menunjukkan penurunan. Menurut Bappenas mengatakan bahwa pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia diperlukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.⁸ Ketimpangan pembangunan antarwilayah terutama Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur harus dilakukan tindakan nyata untuk mendorong pengurangan kemiskinan di Indonesia.



Sumber : Data diolah (2014).

Gambar 1. Perkembangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan (Indeks Williamson) Indonesia Tahun 2004-2013

dan miskin. Di pihak lain ketimpangan pembangunan juga menciptakan kantong-kantong kemiskinan pada kawasan-kawasan terpencil, terisolir, kritis dan miskin sumber daya serta merupakan kawasan tertinggal yang menyebabkan kesenjangan antarwilayah. Khusus ketimpangan antarwilayah di Indonesia yang terjadi padahal pada saat yang bersamaan provinsi-provinsi tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia adalah dengan semakin meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto

⁷ Todaro, M.P, *Economic Development*. 7th Edition, New York : Wesley Longman, Inc, 2000, hlm. 109-115.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, terlihat bahwa perkembangan ketimpangan antarwilayah dan kemiskinan periode tahun 2004 sampai dengan 2013 di Indonesia yang memiliki tren menurun. Pertanyaan yang kemudian layak dikemukakan adalah: Bagaimana perkembangan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia serta bagaimana pengaruh ketimpangan pembangunan antarwilayah terhadap kemiskinan di Indonesia?

⁸ Bappenas, *Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah*, (Online), (http://www.bappenas.go.id/files/3813/5762/8989/bab-26_20091007161707__26.pdf), diakses tanggal 29 Januari 2015.)

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah ingin mengetahui perkembangan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Kemudian tujuan penelitian yang kedua adalah menganalisis pengaruh ketimpangan pembangunan antarwilayah terhadap kemiskinan di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan kepada berbagai *stakeholder* terkait pengentasan kemiskinan di Indonesia.

D. Teori/Kerangka Pemikiran

Pengertian atau definisi mengenai kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral.⁹ Akan tetapi Kuncoro mendefinisikan bahwa konsep kemiskinan sebagai perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin.¹⁰

Lebih lanjut Michael Parkin mengatakan bahwa kemiskinan adalah situasi dimana pendapatan rumah tangga terlalu rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka kesulitan untuk dapat membeli makanan, rumah dan pakaian yang mereka butuhkan setiap hari.¹¹ *World Bank* memberikan kategori orang yang dapat dikelompokkan ke dalam miskin adalah orang yang per harinya pendapatannya kurang dari USD 2 sehari. Definisi ini berbeda dengan yang dipegang oleh Pemerintah Indonesia, kemiskinan diukur dengan menghitung kebutuhan pangan seseorang dalam sehari, diukur dengan satuan kalori kemudian dikalikan dengan harga.¹²

Sedangkan definisi mengenai ketimpangan pembangunan antarwilayah menurut hipotesa Neo Klasik dalam Sjafrizal (2012) proses pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya dan dapat mengarah kepada ketimpangan ekonomi antarwilayah. Menurut hipotesa Neo Klasik tersebut pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan

pembangunan antarwilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesis ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan akan menjadi rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah berbentuk huruf U terbalik.¹³

Kebenaran Hipotesis Neo Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jeffrey G. Williamson dalam Sjafrizal (2012) melalui studi yang dilakukan pada tahun 1966 tentang ketimpangan pembangunan antarwilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross-section*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Neo Klasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya.

Mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah dalam suatu negara atau daerah bukanlah hal yang mudah karena hal ini dapat menimbulkan perdebatan yang panjang. Namun pada umumnya metode yang lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah dengan menggunakan metode *Indeks Williamson*. Dalam ilmu statistik, indeks ini adalah *coeffecieint of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah Indeks *Williamson* muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang pertama kali menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah,¹⁴

Simon Kuznet menghubungkan laju pertumbuhan sebagai negara maju dan negara sedang berkembang dengan mengamati data *time series* untuk Amerika, Inggris dan Jerman serta data *cross section* yang mencakup tiga negara tersebut ditambah negara India, Srilangka, serta Puerto Rico dan hasil pengamatan tersebut Kuznet menemukan sebuah pola yang berbentuk U terbalik. Pola tersebut mensyaratkan

⁹ Mulyadi, *Op.Cit.* Hlm. 9

¹⁰ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 5.

¹¹ Michael Parkin, *Economics 8th Edition*, Toronto: Perason International Edition, 2008, hlm. 79-81.

¹² World Bank, *Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: World Bank, 2006.

¹³ Sjafrizal, *Op.cit.* hlm 108.

¹⁴ Lukman Harun dan Ghozali Maski, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya, 2012.

bahwa pada tahapan perkembangan (diwakili dengan PDB per kapita yang masih rendah), maka proses pertumbuhan diikuti oleh semakin memburuknya distribusi pendapatan dan setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan. Pembangunan dengan hasil seperti yang digambarkan oleh hipotesis U terbalik, sebagian besar didasarkan pada model pembangunan dualistik¹⁵

Yusuf, et al. dalam penelitiannya mengenai ketimpangan pembangunan regional di Indonesia pada tahun 2014 mengatakan bahwa dengan mengurangi ketimpangan pembangunan di Indonesia pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di daerah. Pengembangan potensi dari sektor unggulan dari masing-masing daerah harus dapat ditingkatkan di masing-masing daerah, sehingga berdasarkan pengembangan potensi sektor unggulan tersebut dapat memacu pembangunan daerah dan pada akhirnya dapat mengakselerasi pengurangan kemiskinan.¹⁶

Lebih lanjut menurut Aritenang, mengatakan bahwa dengan pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi perlu meningkatkan pertumbuhan GDP per kapita. Dengan peningkatan GDP per kapita tersebut, maka provinsi-provinsi tersebut dapat memacu konvergensi dan mengurangi ketimpangan pembangunan di daerah. Pengurangan ketimpangan pembangunan berarti dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan level pembangunan manusia, peningkatan investasi yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.¹⁷

Purnamasari (2010) melakukan penelitian mengenai kesenjangan pendapatan regional antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2001-2008 dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Williamson dan model data panel. Indeks Ketimpangan Williamson digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan serta menganalisa tren kesenjangan yang terjadi antar kabupaten/kota. Berdasarkan Indeks Ketimpangan Williamson periode tahun 2001-2008 kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tergolong dalam indeks yang tinggi.¹⁸

¹⁵ Munawir Ismail, *Teori Pertumbuhan dan Pemerataan*, Prisma tahun XXIV No. 1, 1995.

¹⁶ Arief Yusuf, Mark Horridge, Edimon Ginting, Priasto Aji, *Reducing Disparity Through a Regions-Focused Development: A Modeling Approach of Assessing the Indonesia MP3I, Working Paper in Economics and Development Studies No. 201402*, Bandung: Departement of Economics, Padjadjaran University, 2014.

¹⁷ Adiwana F. Aritenang, *A Study on Indonesia Regions Disparity Post Decentralization*, MRPA Paper No. 25245, 2010.

¹⁸ Meika Purnamasari, *Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional Kabupaten/Kota Periode Tahun 2001-2008 di Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2010.

E. Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan penelitian mengenai perkembangan ketimpangan pembangunan dan kemiskinan di Indonesia. Sedangkan analisa kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, ketimpangan pembangunan antarwilayah terhadap kemiskinan di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*). Untuk itu, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang berupa dokumen atau asrip yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), situs internet dan buku terkait. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Data yang digunakan menggunakan sample dari 33 provinsi, kemudian dari 33 provinsi tersebut dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu Indonesia Bagian Barat dan Timur. Pengelompokkan ini digunakan untuk lebih memperlihatkan perbedaan kondisi antara Indonesia Bagian Barat dan Timur.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kemiskinan

Penelitian ini menggunakan data jumlah penduduk miskin yang digunakan bersumber dari BPS. Konsep kemiskinan menurut BPS dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) makanan dan bukan bahan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.¹⁹

2. PRDB

PDRB adalah jumlah output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam perekonomian dalam satu waktu tertentu. Dalam penelitian ini, data PDRB yang digunakan adalah PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun dasar 2000 yang mencerminkan PDRB sesungguhnya yang dihasilkan oleh perekonomian suatu daerah setelah dieleminir dari pengaruh harga.

3. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antarwilayah menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson²⁰:

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Data Strategis Indonesia 2013*. Jakarta: BPS, 2013.

²⁰ Sjafrizal. *Loc Cit.*, hlm. 110-111

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 (f_i/n)}}{y}$$

Dimana :

V_w = Koefisien Variasi Williamson (Indeks Williamson)

Y_i = PDRB Per Kapita Daerah masing-masing Provinsi di Indonesia

Y = PDB per kapita nasional seluruh provinsi di Indonesia

f_i = Jumlah penduduk masing-masing provinsi di Indonesia

i = Wilayah

n = Jumlah penduduk seluruh Indonesia

Sedangkan Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi ditunjukkan oleh angka 0 sampai dengan angka 1 atau $0 < V_w < 1$. Semakin mendekati 0 berarti ketimpangan semakin rendah dan semakin mendekati 1 berarti ketimpangan semakin lebar. Data ketimpangan pembangunan antarwilayah diolah penulis dengan menggunakan data yang bersumber dari BPS.

4. Aglomerasi

Menurut Matitaputty dalam Tiffani aglomerasi muncul ketika sebuah aktifitas ekonomi dan penduduk serta industri melakukan pengelompokan atau terkonsentrasi secara spasial, pengelompokan ini diakibatkan usaha dari pelaku aktivitas ekonomi serta penduduk untuk melakukan penghematan, didukung oleh lokasi yang berdekatan.²¹ Aglomerasi diukur dengan menghitung *share* PDRB wilayah terhadap total PDRB. Bila ditulis secara matematis sebagai berikut:

$$Ag = \frac{PDRB_i}{PDRB_{total}}$$

5. Investasi

Investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah investasi yang dilakukan oleh swasta, baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Data investasi yang digunakan menggunakan data PMA dan PMDN yang telah direalisasikan menurut lokasi bersumber dari BKPM.

Metode Estimasi

Teknik estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah estimasi panel data. Estimasi panel data adalah estimasi yang menggabungkan antara data *time series* dan *cross section*. Salah satu tujuan menggunakan estimasi panel menurut Baltagi (1995) yaitu dapat meneliti karakteristik individu yang mencerminkan dinamika antar waktu dari masing-masing variabel independen, sehingga analisis lebih komprehensif dan mencakup hal-hal yang mendekati realita. Dalam estimasi panel data, ada tiga pendekatan yang bisa digunakan yaitu *common effects*, *fixed effects* dan *random effects*. Untuk memilih antara pendekatan *common effects* dan *fixed effects* digunakan Uji F.

Rumus Uji F yang digunakan adalah

$$F = F = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2)/m}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k)}$$
, dimana R_{UR}^2 adalah

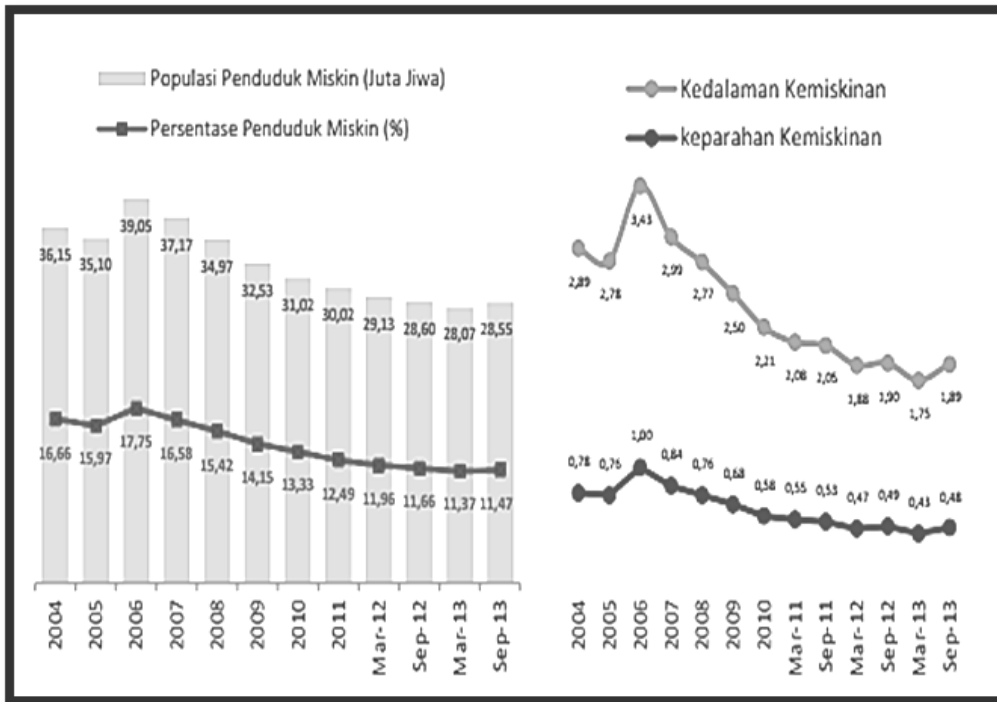
R^2 untuk *fixed effects*, R_R^2 adalah R^2 untuk *common effects*, m adalah jumlah restriksi, n adalah banyaknya observasi dan k adalah jumlah parameter dalam *fixed effects*. Hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *common effects* dan H_a : *fixed effects*. Sedangkan untuk memilih antara pendekatan *fixed effects* dan *random effects* digunakan Uji Hausman. Dimana hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *random effects* dan H_a : *fixed effects*.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah dan Kemiskinan di Indonesia

Selama periode tahun 2004 sampai dengan 2013, terlihat adanya tren penurunan jumlah orang miskin maupun angka kemiskinan. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2. Berdasarkan data dari BPS pada September 2013, terdapat 28,55 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan yang berarti angka kemiskinan sebesar 11,47 persen. Pada periode 2006-2009, tingkat kemiskinan turun lebih dari 1 titik persen (*percentage point*) setiap tahunnya. Namun dalam periode 2010-2013 terjadi perlambatan penurunan tingkat kemiskinan. Perlambatan yang sama juga terjadi dalam hal perubahan angka kemiskinan. Sementara itu indikator kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami tren yang menurun dalam periode 2006-2013. Tren penurunan indikator kedalaman kemiskinan (P1) menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara itu, tren penurunan indikator keparahan kemiskinan (P2) berarti kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin semakin mengecil. Namun demikian, tren perlambatan penurunan juga sangat jelas terlihat untuk kedua indikator ini.

²¹ Mutia Karina Tiffani, Analisis Komparasi Konvergensi, Aglomerasi, Kinerja Ekonomi Daerah Pada Daerah Pemekaran, *Skripsi*, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014.



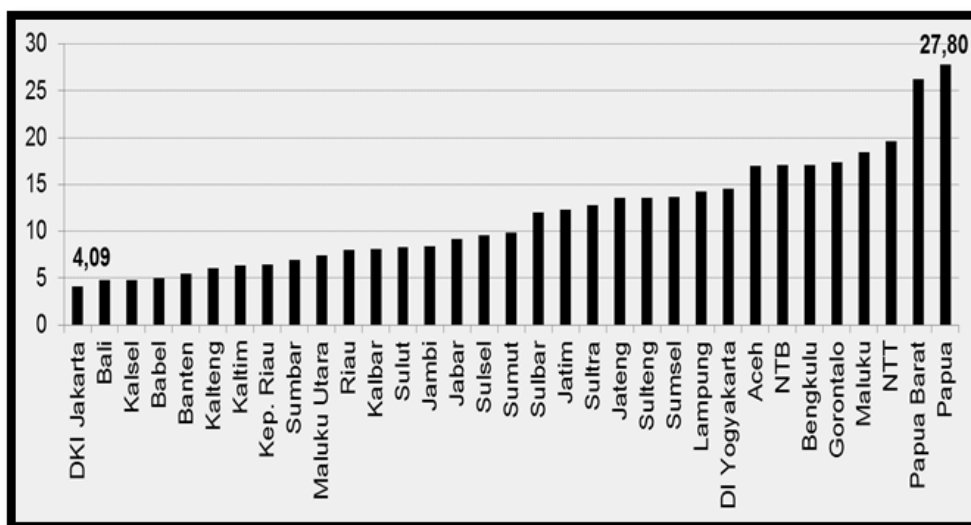
Sumber: BPS (2014).

Gambar 2. Perkembangan Populasi, Persentase, Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Tahun 2004-2013

Berdasarkan perkembangan tingkat kemiskinan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan terjadi perlambatan tren penurunan indikator kemiskinan selama periode 2010-2013. Perlambatan ini akan mempengaruhi target angka kemiskinan sebesar 8-10 persen pada akhir tahun 2014. Diperlukan berbagai upaya khusus untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Oleh karena itu, secara progresif pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga serta yang terpenting pemerintah daerah sangat perlu mengoptimalkan dan mensinergikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sudah

berjalan. Sehingga program tersebut dapat mencapai target *output* yang terukur.

Pada saat yang bersamaan, penelitian ini, penulis mencoba membagi Indonesia menjadi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur. Indonesia Bagian Barat terdiri dari Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Bali. Sementara itu Indonesia Bagian Timur terdiri dari Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, sampai dengan Papua dan Papua Barat. Berdasarkan pembagian tersebut, maka kita akan dapat melihat



Sumber : BPS (2014).

Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi

secara lebih jelas mengenai ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

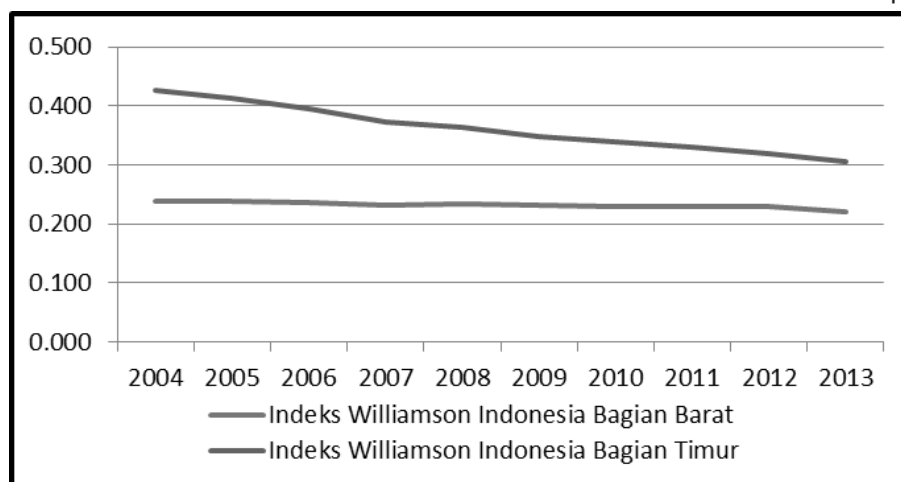
Berdasarkan data BPS pada tahun 2013 yang terlihat pada Gambar 3. disparitas kemiskinan antarprovinsi di Indonesia sangat tinggi. Tingkat kemiskinan di Indonesia Bagian Barat, sebagai contoh di Provinsi DKI Jakarta, Bali, Sumatera dan Jawa relatif lebih rendah dibandingkan di Indonesia Bagian Timur. Perbedaan tingkat kemiskinan di Jakarta hanya sekitar 4,09 persen sedangkan di Indonesia Bagian Timur sebagai contoh di Provinsi Papua hampir mencapai 27,80 persen dari jumlah penduduk. Atau terjadi disparitas sebesar 23,71 persen. Perbedaan persentase penduduk miskin menurut provinsi tersebut sejalan dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang terjadi antara Indonesia Bagian Barat dengan Bagian Timur.

Gambar 4. memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Dengan menggunakan Indeks Williamson, Indonesia Bagian Timur memiliki angka indeks yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia Bagian Barat. Pada tahun 2004, Indeks Williamson untuk Indonesia Bagian Timur adalah sebesar 0,42585 sedangkan Indeks Williamson untuk Indonesia Bagian Barat untuk tahun yang sama adalah sebesar 0,239. Dari Indeks Williamson tersebut terlihat terdapat disparitas angka yang cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa antara Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur masih terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah yang cukup besar. Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia terus masih terjadi hingga tahun observasi tahun 2013.

Williamson untuk Indonesia Bagian Barat sebesar 0,239. Perbedaan Indeks Williamson yang cukup tinggi menandakan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar atau tinggi antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Akan tetapi secara perlahan namun pasti, pada periode selanjutnya Indeks Williamson untuk Indonesia bagian timur mengalami penurunan dari 0,42585 pada tahun 2004 maka pada tahun 2012 menjadi 0,31929. Hal ini pertanda terjadi peningkatan kualitas pembangunan di Indonesia bagian timur sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang terjadi.

Penurunan ketimpangan yang terjadi di Indonesia khususnya di Indonesia bagian timur tidak lepas dari fungsi pemerintah. Menurut Stiglitz yang dikutip oleh Rama, *et. al.* mengatakan bahwa fungsi pemerintah itu sendiri di antaranya adalah fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. Fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien. Fungsi alokasi yang efisien dilakukan dengan cara adanya peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi tersebut merata di seluruh wilayah. Dan diikuti dengan peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan. Fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga.²²

Namun demikian gap antara Indeks Williamson untuk Indonesia bagian timur dan bagian barat secara keseluruhan dari tahun 2004 sampai dengan tahun



Sumber : Hasil Pengolahan Data (2014).

Gambar 4. Perkembangan Indeks Williamson antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur

Akan tetapi yang menarik untuk dicermati adalah bahwa pada tahun 2004, ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama tahun 2004, Indeks Williamson untuk Indonesia bagian timur cukup tinggi sebesar 0,42585 sedangkan Indeks

2013 masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang

²² Rama Nurhuda, Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo, Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur 2005-2011), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 4, 2012.

tercipta di Indonesia bagian timur memang terjadi akan tetapi belum dapat mengimbangi pembangunan yang terjadi di Indonesia bagian barat. Ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut berujung kepada semakin terjadinya disparitas tingkat kemiskinan di Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur. Untuk itu maka diperlukan suatu strategi “*crash program*” untuk mendorong terjadinya konvergensi antara pembangunan di Indonesia bagian bagian barat dan timur.

B. Analisis Hasil Estimasi

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software Eviews 6* dengan metode *fixed effect* dengan pembobotan *cross section weight* untuk data *cross section* Indonesia bagian Barat dan bagian Timur dengan *time series* untuk tahun 2004 sampai dengan 2013.

Penentuan metode estimasi *fixed effect* dengan *cross section weight*, dilakukan setelah melakukan tahapan-tahapan pengujian sebagai berikut:

1. Untuk pemilihan metode estimasi untuk penggunaan metode *individual effect* atau *common effect* dilakukan dengan uji F.

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n \text{ (intersep sama/ common effect)}$$

$$H_1 : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_n \text{ (individual effect)}$$

$$F = \frac{(R_{UR}^2 - R_A^2)/q}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k)} = \frac{(0.999 - 0.998)/2}{(1 - 0.999)/60 - 5} = 27,5$$

Berdasarkan rumus diatas didapatkan nilai F-hitung sebesar 27,5 sementara nilai F tabel sebesar 3,23. Maka F-hitung > F-tabel sehingga H_0 ditolak, yang menyatakan bahwa intersep adalah sama yaitu dengan metode *common effect*, dan metode yang lebih baik adalah metode estimasi dengan *individual effect*, di mana intersep antar individu berbeda.

2. Dari efek individual, dilakukan pengujian untuk pemilihan antara model efek tetap (*fixed effect*) atau efek acak (*random effect*) yaitu melalui *redundant fixed effect tests*.

$$H_0 : \text{fixed effect}$$

$$H_1 : \text{random effect}$$

Hasil dari *Hausman test* diperoleh hasil sebagai berikut :

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	0.142528	(8,6)	0.9926
Period Chi-square	3.131718	8	0.9258

Sumber : eviews 6 diolah.

Dengan nilai probabilita sebesar 0.9926, maka H_0 (model *fixed effect*) tidak ditolak, sehingga model yang tepat adalah menggunakan efek tetap (*fixed effect*).

Berdasarkan hasil tersebut, maka model diestimasi menggunakan *fixed effect*. Maka model estimasi terbaik yang didapat adalah sebagai berikut:

Tabel1. Hasil Regresi Panel

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
PDRB	-0,753	-4,869	0,0213
Investasi	-0,602776	-9.5098	0.0010
Aglomerasi	41.2830	17.575	0.000
Ketimpangan Pembangunan	0,662931	-4.99437	0.0016
Fixed Effects (Cross)			
_Barat—C	-1,4600		
_Timur—C	1,46056		
R ²	0,890		
F	1491.301		
Prob(F-Stat)	0.0000		

Sumber: data diolah dengan *Eviews 6.0*

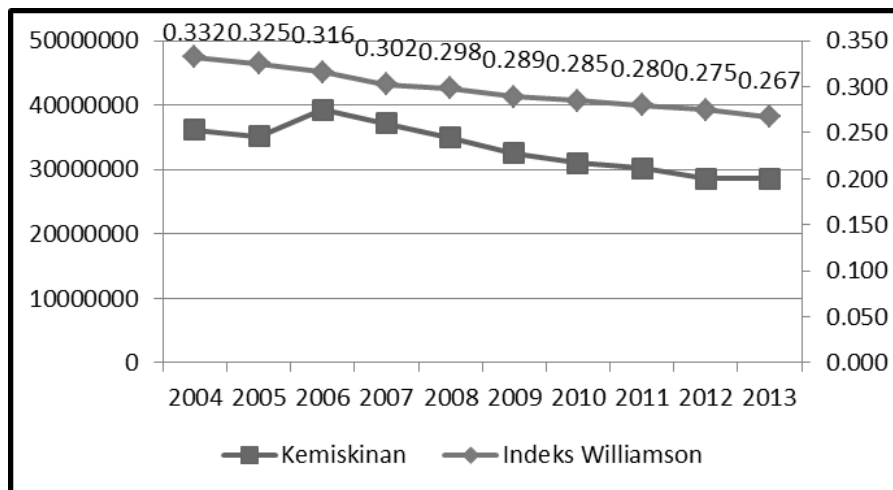
Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa uji F dari pengaruh pertumbuhan masing-masing variabel mulai dari PDRB, investasi dan aglomerasi dan ketimpangan pembangunan terhadap pertumbuhan kemiskinan dalam hal ini ditunjukkan oleh indeks williamson menunjukkan angka signifikan dengan probalitas (F-stat) = 0,00000 < α (0.05). Artinya, secara bersama-sama pertumbuhan dari masing-masing variabel independen dalam model secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan variabel dependen. Nilai R^2 *adjusted* sebesar 0,89 artinya model secara representatif dapat menjelaskan keragaman variabel dependen sebesar 89 persen. Dalam metode estimasi panel data sering mengandung masalah heteroskedastisitas, tetapi dalam estimasi ini tidak mengandung masalah tersebut. Karena model ini diestimasi menggunakan Metode GLS *White Heteroskedasticity-Consistent Standard Error and Covariance*, sehingga diasumsikan model sudah bersifat homoskedastisitas

Hasil analisis regresi panel diperoleh bahwa pertumbuhan ketimpangan pembangunan secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kemiskinan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0016 lebih kecil dari pada α 0,05. Berdasarkan hasil analisa didapatkan bahwa setiap 1 persen penurunan pertumbuhan ketimpangan pembangunan antarwilayah maka akan menurunkan pertumbuhan kemiskinan sebesar 0.6629 persen, *ceteris paribus*. Hasil regresi ini berarti

setiap terjadi penurunan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia maka akan mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi. Sebaliknya jika terjadi kenaikan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia maka akan dapat meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Haan pada tahun 2004 melakukan penelitian dengan sampel negara

hingga menjadi 0,267. Hal yang sama terjadi juga dengan kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebesar 36,15 juta jiwa mengalami penurunan sebesar 21,03 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 28,5 juta jiwa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 juga mengalami tren pertumbuhan yang menurun.



Sumber : Data diolah (2014).

Gambar 5. Indeks Williamson dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2004-2013

India. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa semakin tinggi ketimpangan pembangunan di suatu wilayah maka akan mendorong peningkatan kemiskinan di wilayah tersebut.²³ Lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh Datt dan Ravallion pada tahun 1990 menekankan bahwa salah satu jalan pengentasan kemiskinan di suatu daerah adalah dengan menghilangkan ketimpangan antarwilayah yang terjadi. Karena ketimpangan tersebutlah yang pada akhirnya mendorong terciptanya kemiskinan.²⁴ Untuk itu penting bagi pemerintah bukan hanya menciptakan proses pembangunan akan tetapi juga memenuhi unsur pemerataan pembangunan. Hal ini ditujukan agar proses pembangunan merata di seluruh Indonesia dan bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

Hasil penelitian secara kuantitatif senada dengan analisa grafis seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. tren Indeks Williamson yang mengukur ketimpangan mengalami penurunan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2004, Indeks Williamson Indonesia adalah sebesar 0,332 mengalami penurunan sampai dengan tahun 2013

Maka untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia bagian barat dan timur, perlu dilakukan pertumbuhan regional yang disertai dengan pemerataan. Untuk dapat tumbuh secara cepat, suatu negara perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang memiliki potensi paling kuat. Apabila region ini kuat maka akan terjadi perembetan pertumbuhan bagi region-region yang lemah. Pertumbuhan ini berdampak positif yaitu pertumbuhan di region yang kuat akan menyerap potensi tenaga kerja di region yang lemah atau mungkin region yang lemah menghasilkan produk yang sifatnya komplementer dengan produk region yang kuat.²⁵ Diperlukan suatu koordinasi antara daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia agar dapat melakukan koordinasi terkait pertumbuhan dan pemerataan. Sehingga pada akhirnya ketimpangan pembangunan dan kemiskinan dapat berkurang di Indonesia.

Sementara itu untuk variabel pertumbuhan PDRB, hasil analisis regresi panel menunjukkan bahwa hasil variabel pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien variabel investasi yang negatif

²³ Arjan de Haan, Disparities within India's Poorest Regions: Why do The Same Insitution Work Diffrenly in Diffrence Place? *World Development Report*, 2004.

²⁴ Gaurav Datt dan Martin Ravallion, *Regional Disparities, Targeting, and Poverty in India*, Working Paper, World Bank, 1990.

²⁵ Wiyardi dan Rina Trisnawati, Analisa Potensi Daerah Untuk Mengembangkan Wilayah di Eks Keresidenan Surakarta, *Jurnal Fokus Ekonomi* No. 3(1), 2003, hlm. 10-23.

0,579 dan probabilitasnya sebesar 0.0220 lebih kecil dibandingkan dengan alpha 0,05. Hasil ini berarti bahwa setiap 1 persen peningkatan pertumbuhan PDRB yang dilakukan maka dapat mengurangi 0,579 persen pertumbuhan ketimpangan, *ceteris paribus*. Berdasarkan hasil tersebut, pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat diselesaikan salah satunya dengan cara meningkatkan PDRB yang merata di seluruh Indonesia, baik Indonesia bagian barat maupun bagian timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astrini pada tahun 2013. Dengan menggunakan data di Provinsi Bali, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Bali.²⁶ Pendapat senada dikemukakan oleh Rusdarti dan Karolina, yang melakukan penelitian dengan menggunakan data dari Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah.²⁷ Lebih lanjut Indah mengatakan bahwa pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Barat memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Barat melalui desentralisasi fiskal saat ini.²⁸ Untuk itu salah satu langkah strategis pengurangan tingkat kemiskinan di daerah adalah dengan meningkatkan PDRB daerah. Peningkatan PDRB daerah dapat dilakukan dengan menggali potensi-potensi sumber daya yang ada di daerah untuk dapat ditingkatkan menjadi sumber penggerak ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil regresi diatas, diperoleh hasil bahwa variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang terjadi baik untuk Indonesia bagian barat dan bagian timur. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari pada alpha 5 persen. Kenaikan 1 persen pertumbuhan investasi akan menurunkan pertumbuhan kemiskinan sebesar 0,602 persen, *ceteris paribus*. Teori yang dikemukakan oleh Myrdal yang dikutip oleh Yeniwati mengatakan bahwa dampak balik yang diakibatkan oleh perpindahan modal dan motif laba yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi,

sedangkan wilayah-wilayah lainnya akan terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang tidak merata pada setiap daerah menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketidak merataan pembangunan²⁹. Dan kondisi tersebut terjadi di Indonesia, dimana investasi lebih banyak terpusat pada Indonesia bagian barat yang memiliki harapan laba yang tinggi. Hal ini berdampak kepada semakin terpolarisasinya pembangunan di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur semakin tertinggal. Dampak akhirnya adalah terjadinya kemiskinan di Indonesia bagian timur yang semakin sulit untuk dikurangi.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nizar et al. pada tahun 2013. Dengan menggunakan sampel Indonesia dan data *time series* dari tahun 1980 sampai dengan 2010 menemukan bahwa variabel investasi dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Lebih lanjut menurut Sukirno (2000) yang dikutip oleh Nizar et al. mengatakan bahwa investasi yang dilakukan secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.³⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Mekahsari terhadap Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012 menemukan bahwa investasi yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan melalui FDI memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.³¹

Berdasarkan hasil regresi diatas, menunjukkan hasil bahwa variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang terjadi baik untuk Indonesia bagian barat dan bagian timur. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari pada alpha 5 persen. Kenaikan 1 persen aglomerasi akan meningkatkan pertumbuhan kemiskinan sebesar 1,2830 persen, *ceteris paribus*. Semakin meningkatnya aglomerasi maka akan menyebabkan terkonsentrasinya kegiatan produksi yang cukup tinggi hanya di pusat-pusat kegiatan aktivitas perekonomian. Sedangkan bagi daerah lain yang memiliki konsentrasi kegiatan produksi rendah akan mendorong pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat. Oleh

²⁶ Myanti Astrini, Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* No. 8(2), 2013, hlm 350-400.

²⁷ Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Economia* No. 1(9), 2013, hlm. 1-9.

²⁸ Siska Permata Indah, Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap PDRB, Tenaga Kerja dan Kemiskinan di Jawa Barat, *Skripsi*, Bogor: Fakultas Ekonomi dan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor, 2011.

²⁹ Yeniwati, Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol II No. 03, 2013.

³⁰ Charirul Nizar, Abubakar Hamzah dan Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Ekonomi* No. 2(1), hlm 1-8, 2013.

³¹ Ika Mekahsari, Pengaruh Investasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012..

karena itu, aglomerasi mendorong semakin tingginya kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah.³²

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siagian pada tahun 2005. Dengan menggunakan sampel Provinsi DKI Jakarta, menemukan fakta bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara aglomerasi dan kemiskinan khususnya di perkotaan. Konsentrasi pembangunan yang terjadi di kota-kota besar menyebabkan beberapa daerah yang kurang tersentuh pembangunan menjadi kurang berkembang dan mengalami peningkatan kemiskinan.³³ Pendapat yang sama dikemukakan Dody dan Gunanto, dengan melakukan studi kasus di 44 kota di Indonesia dan menggunakan data dari tahun 2007 sampai dengan 2010 hasil penelitian ini menemukan bahwa aglomerasi terkadang menciptakan suatu permasalahan baru. Dengan semakin meningkatnya aglomerasi di kota-kota besar di Indonesia, berdampak terhadap meningkatnya urbanisasi di 44 kota tersebut. Dari data tersebut terlihat kecenderungan bahwa urbanisasi kependudukan di Indonesia juga diikuti dengan urbanisasi kemiskinan yang lebih lanjut pada timbulnya berbagai aspek permasalahan perkotaan.³⁴

Wahyu dan Hendaro melakukan penelitian pada tahun 2012 dengan menggunakan sampel Kabupaten Kendal. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa aglomerasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi.³⁵ Akan tetapi dampak lainnya adalah bagi daerah sekitar yang tidak menikmati dampak dari aglomerasi tersebut. Bagi daerah-daerah yang kurang memiliki potensi sektor ekonomi bagi aglomerasi, maka daerah tersebut kurang menikmati pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat bagi pengurangan kemiskinan di Indonesia.³⁶

Analisis Cross Section

Berdasarkan angka koefisien *cross section*, disebutkan apabila variabel-variabel independen tidak mengalami perubahan atau dianggap konstan, maka kemiskinan di Indonesia bagian barat memiliki indeks yang negatif (-1,4600). Sedangkan kemiskinan di Indonesia bagian timur mengalami indeks yang positif (1,4056). Hal ini menunjukkan bahwa pada saat variabel independen konstan, maka kemiskinan di Indonesia bagian barat akan memiliki kecenderungan menurun sebaliknya di Indonesia bagian timur mengalami kecenderungan peningkatan. Untuk itu perlu ditekankan bahwa tanpa adanya langkah kongkrit dari pemerintah, maka Indonesia bagian timur akan sulit melakukan pengurangan kemiskinan.

III. KESIMPULAN

Perkembangan kemiskinan di Indonesia secara umum mengalami penurunan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Penurunan populasi penduduk miskin tersebut walaupun pada periode tahun 2010 sampai dengan 2013 mengalami perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia sejalan dengan penurunan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pada periode yang sama dari tahun 2004 sampai dengan 2013 terjadi penurunan ketimpangan pembangunan baik untuk Indonesia bagian barat dan timur. Walaupun berdasarkan analisis kualitatif juga ditemukan bahwa persentase penduduk miskin menurut provinsi lebih banyak terdapat di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan di Indonesia bagian barat.

Berdasarkan hasil analisis regresi panel ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel ketimpangan pembangunan dan aglomerasi terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa setiap pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah dan aglomerasi yang terjadi di Indonesia maka dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel PDRB dan investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa setiap pertumbuhan PDRB dan Investasi dapat mendorong pengurangan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan hasil tersebut, maka sudah waktunya bagi pemerintah untuk melakukan *crash program* untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Salah satunya adalah dengan pembangunan infrastruktur yang baik di Indonesia bagian timur. Infrastruktur tersebut terdiri dari pembangunan pelabuhan-pelabuhan, perbaikan jalan darat, penambahan daya

³² Yuki Anglia, Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010.

³³ Matias Siagian, Aglomerasi dan Kemiskinan Perkotaan, *Jurnal Wawasan* No. 2(11), hlm. 42-46, 2005.

³⁴ Dody Nursetyo Yekni Hapsoro dan Gunanto, Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan, *Diponegoro Journal of Economics* No. 2(2), hlm 1-12, 2013.

³⁵ Ardyan Wahyu Sandhika dan Mulyo Hendaro, Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk dan Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal. *Diponegoro Journal of Economic* No. 1(1), hlm. 1-6, 2012.

³⁶ Ari Muliarta Ginting, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor-Sektor Keuangan terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* No. 1(2), hlm. 117-130, 2013.

dan kapasitas listrik, pembangunan rumah sakit dan puskesmas yang handal, serta yang juga penting adalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Tanpa itu semua maka sulit bagi Indonesia bagian timur untuk mengejar ketertinggalan dari Indonesia bagian barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Erlangga.
- Mulyadi, Mohammad, (2014). *Kemiskinan: Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta : Publica Press.
- Parkin, Michael. (2008). *Economics*, (Edisi ke-8). Toronto: Pearson International Edition.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Todaro, M.P. (2000). *Economic Development*. (Edisi ke-7) New York: Wesley Longman, Inc.

Jurnal dan Majalah:

- Alisjahbana, Armida S. (2005). Kesenjangan Regional di Indonesia, Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, No.16: Okt-Des/2005.
- Aritenang, Adiwawan F. (2010). A Study on Indonesia Regions Disparity Post Decentralization. MRPA Paper No. 25245.
- Astrini, Myanti. (2013). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, No.8(2).
- Datt, Gaurav & Ravallion, Martin. (1990). Regional Disparities, Targeting, and Poverty in India, World Bank Working Paper.
- Ginting, Ari Mulyanta. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor Sektor Keuangan terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, No. 1(2).
- Hapsoro, Dody Nursetyo Yekni & Gunanto. (2013). Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan, *Diponegoro Journal of Economics* No. 2(2).

Ismail, Munawir. (1995). Teori Pertumbuhan dan Pemerataan, *Prisma*, tahun XXIV No. 1.

Nizar, Charirul., Hamzah, A., dan Syahnur, S. (2013). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, No. 2(1).

Nurhuda, Rama., Muluk, Khairul., & Prasetyo, Wima Yudo. (2012). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 4.

Rusdarti dan Sebayang, Lesta Karolina. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*, No. 1(9).

Sandhika, Ardyan Wahyu & Hendarto, Mulyo. (2012). Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk dan Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal. *Diponegoro Journal of Economic* No. 1(1).

Siagian, Matias. (2005). Aglomerasi dan Kemiskinan Perkotaan, *Jurnal Wawasan*, No. 2(11).

Wiyardi dan Trisnawati, Rina. (2003). Analisa Potensi Daerah Untuk Mengembangkan Wilayah di Eks Keresidenan Surakarta. *Jurnal Fokus Ekonomi*, No. 3(1).

Yeniwati. (2013). Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol II No. 03.

Yusuf, Arief., Horridge, Mark., Ginting, Edimon., & Aji, Priasto. (2014). Reducing Disparity Through a Regions-Focused Development: A Modeling Approach of Assessing the Indonesia MP3I. Working Paper in Economics and Development Studies, No. 201402, Departement of Economics, Padjadjaran University.

Internet:

Bappenas. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah, (*online*), (http://www.bappenas.go.id/files/3813/5762/8989/bab-26_20091007161707_26.pdf), diakses 29 Januari 2015).

"Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Timur", (*online*), (<http://news.bisnis.com/read/20140721/15/244928/jokowi-akui-ketimpangan-pembangunan-di-indonesia-timur>), diakses 9 September 2014).

Dokumen Resmi:

Badan Pusat Statistik. (2013). *Data Strategis Indonesia 2013*. Jakarta: BPS.

De Arjan, Haan. (2004). *Disparities within India's Poorest Regions: Why do The Same Insitution Work Diffrenly in Diffrence Place?*. Washington DC: World Bank.

World Bank. (2006). *Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta : World Bank.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Anglia, Yuki. (2010). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Harun, Lukman & Maski, Ghozali. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Indah, Siska Permata. (2011). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap PDRB, Tenaga Kerja dan Kemiskinan di Jawa Barat. Skripsi tidak diterbitkan. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor.

Mekahsari, Ika. (2012). "Pengaruh Investasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan". Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.

Purnamasyari, Meika. (2010). Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional Kabupaten/Kota Periode Tahun 2001-2008 di Provinsi Jawa Barat. Skripsi tidak diterbitkan. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Tiffani, Mutia Karina. (2014). Analisis Komparasi Konvergensi, Aglomerasi, Kinerja Ekonomi Daerah Pada Daerah Pemekaran. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.